



Judul : DPR Janji Benahi Cukai Rokok
Tanggal : Minggu, 21 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 14

Dengar Keluhan Pelaku Industri Rokok Di Malang **DPR Janji Benahi Cukai Rokok**

KETUA DPR Puan Maharani bertemu dengan pelaku industri rokok kecil dan menengah, dalam kunjungan kerjanya di Malang, Jawa Timur. Dalam dialog bersama Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (FORMASI) Malang Raya, dia mendapat banyak keluhan kesah dari pelaku industri rokok.

Puan datang dalam forum diskusi bersama pelaku industri rokok di Malang, Jumat (20/1/2024). Dia didampingi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim V, Kris Dayanti (KD) dan Andreas Eddy Susetyo.

Sebanyak 50 orang dari industri rokok kecil dan menengah se-Malang Raya hadir dalam dialog bersama Puan. Industri rokok menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di Malang Raya, karena cukup banyak menyerap tenaga kerja.

“Saya senang bertemu dengan para pengusaha rokok. Di Indonesia, rokok memiliki status unik, karena menjadi industri sekaligus budaya,” kata Puan.

Sebagai industri, lanjut dia,

rokok perlu dilihat bukan hanya pada produk akhirnya. Puan menyebut, ada berbagai faktor lainnya yang harus mendapat perhatian dari produk tersebut, seperti adanya petani tembakau, petani cengkeh, buruh, pabrik dan pengusahanya.

Sementara, dari kacamata budaya, rokok sering ditemukan sebagai bagian dari acara adat istiadat berbagai suku di Indonesia.

“Rokok sudah menjadi bagian dari sejarah rakyat Indonesia seperti yang terlihat di film serial ‘Gadis Kretek’ yang tayang di Netflix,” urai Puan.

Berdasar gambaran tersebut, tegas dia, DPR tidak pernah gegabah atau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan terkait urusan rokok. Sebab, setiap keputusan yang diambil dapat berdampak kepada industri rokok di Indonesia.

“DPR melihat semua aspek. Kami mendengar semua pemangku kepentingan, dari sisi hulu sampai hilir. DPR mempertimbangkan semua skenario yang bisa terjadi sebagai hasil dari

sebuah kebijakan,” tegas mantan Menko Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (PMK) itu.

Menurut Puan, salah satu hal yang menjadi perhatian DPR adalah persoalan tentang cukai rokok, yang banyak memiliki pro-kontra dan dampak.

“Kami tidak melihat persoalan cukai rokok dari kacamata pendapatan negara saja. Kami melihat dampaknya terhadap pengusaha, hingga para petani tembakau dan cengkeh,” tandasnya.

Salah seorang pelaku industri rokok kecil rokok di Malang, Sah-rulkarim meminta Pemerintah membuat roadmap, agar mereka bisa menjalani usaha dengan nyaman. Termasuk, pemberian cukai yang adil, karena bila cukai mahal konsumen akan beralih ke rokok ilegal.

“Roadmap kebijakan Pemerintah ke depan untuk industri rokok seperti apa? Libatkan pengusaha dalam pengambilan kebijakan. Lahirnya rokok ilegal juga dipengaruhi karena proses izin pabrik rokok yang panjang dan rumit,” keluhanya. ■ **OSP**